

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan pendapatan riil perkapita. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta pendistribusian pendapatan. Pengangguran ini terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat angkatan kerja yang tidak setara dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan.²

Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk sebuah pola kemitraan antara pemerintah dan sektor pariwisata guna menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan aktivitas ekonomi daerah tersebut. Isu utama dalam pembangunan daerah adalah menekankan pada kebijakan pembangunan yang memanfaatkan potensi sumberdaya daerah berdasarkan karakteristik daerah itu. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakat harus mampu memanfaatkan potensi

² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 79

sumberdaya yang ada untuk mengembangkan perekonomian daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dalam implementasinya, memiliki strategi pembangunan salah satunya adalah strategi pembangunan Indonesia. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh. Hak-hak dasar rakyat yang dimaksud merupakan dalam bentuk kebebasan dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, ketakutan, dan kebebasan berekspresi. Dan hak-hak tersebut selama ini telah terabaikan dan hanya menjadi tujuan sekunder dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Padahal hak-hak dasar tersebut ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai melalui program ini antara lain; mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan dan memperkuat kualitas pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, termasuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai bagi masyarakat.³

³ Akbar Sisputro dan Achma Hendra, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi, dan Beban/Tanggung Jawab Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Magelang Periode Tahun 1990-2010*, Vol 2, No. 3, Diponegoro Journal of Economics, (Semarang: Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2013), hal. 1

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja atau sedang mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.⁴ Pengangguran merupakan masalah kompleks yang dialami sebagian besar negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam hal ini, negara berkembang tidak mampu menghadapi masalah tersebut dengan memberikan tunjangan kepada warga yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan tunjangan tersebut. Oleh karena itu, pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial di masyarakat karena seseorang yang tidak bekerja mereka tidak memperoleh penghasilan.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Negara berkembang pada umumnya menghadapi berbagai masalah mulai dari kemiskinan dan pengangguran hingga sektor-sektor lain termasuk masalah ketenagakerjaan. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Jika pengangguran tersebut tidak segera ditanggulangi, maka dapat menimbulkan tindak kejahatan dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan.

Jawa Timur merupakan sebuah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Dengan luas wilayah 48.033 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 40.878.789 jiwa (tahun 2021) dan kepadatan penduduk

⁴ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori...*, hal. 78

⁵ Kasanah, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah*, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. (1), ISSN : 2355-4665, hal. 21-25

857 jiwa/km².⁶ Permasalahan pengangguran juga dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

Grafik 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, 2021

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran terbuka di Jawa Timur mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah pengangguran secara signifikan. Hal ini terjadi karena pandemic *covid-19* yang menyerang seluruh dunia. Akibat dari pandemi tersebut melemahkan perekonomian dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kemudian pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mulai membaik dengan menurunnya prosentase jumlah pengangguran terbuka sebesar 0,10%.

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2021

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terdiri dari mereka yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang menganggur dan mempersiapkan usaha, mereka yang menganggur dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.⁷ Pengangguran yang tidak memiliki penghasilan ini akan menambah beban keluarga dan masyarakat. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran terbuka berdampak pada produktivitas dan daya beli masyarakat, kemiskinan, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang tentunya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik.

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah merupakan yang diterima oleh suatu unit tenaga kerja yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepadanya.⁸ Besar kecilnya tingkat upah yang ditetapkan oleh pemerintah akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah pada suatu wilayah secara tidak langsung akan berdampak terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah tenaga kerja pada negara tersebut. Oleh karena itu, tingkat upah yang tinggi mempengaruhi pengangguran yang tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tingginya upah yang ditetapkan

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

⁸ Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 112

maka semakin tinggi pula biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan. Sehingga perusahaan akan melakukan efisiensi produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja.⁹

Tabel 1.1
Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)
2017	1.388.000
2018	1.508.895
2019	1.630.059
2020	1.768.777
2021	1.868.777

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, tingkat upah minimum di Provinsi Jawa Timur semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang diukur dari segi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatnya Kebutuhan Hidup Layak ini dapat menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Selain upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat mempengaruhi pengangguran. Menurut Feriyanto, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah

⁹ Ibid

nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Meningkatnya output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerjanya supaya produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi.¹⁰ Atau dengan kata lain peningkatan PDRB akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan pengangguran di wilayah tersebut menjadi berkurang. Berikut ini data PDRB di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.2
Data PDRB Provinsi Jawa Timur (persen) Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB Jawa Timur
2017	5,46
2018	5,47
2019	5,53
2020	-2,33
2021	3,57

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, 2021

Pada tabel 1.3 diatas, menunjukkan bahwa PDRB di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Tahun 2019 yang tingkat PDRB nya tinggi yang berarti pada tahun tersebut nilai tambah atas barang atau jasa yang dihasilkan meningkat.

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang padat penduduk di pulau jawa ini dengan jumlah pertumbuhan selau meningkat dari tahun ke tahun. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ini yaitu

¹⁰ Kuncoro, *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2015, hal.77

angka kelahiran, angka kematian dan migrasi yang cukup tinggi di Jawa Timur. Pertumbuhan penduduk tersebut dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan ekonomi daerah.¹¹ Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin bertambah pula jumlah angkatan kerja. Disisi lain, jumlah tenaga kerja tersebut akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang besar tidak menjamin keberhasilan pembangunan, dan jumlah penduduk yang besar dapat menjadi beban pembangunan daerah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2021.

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk (Jiwa) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik ((BPS) Provinsi Jawa Timur, 2021

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jawa Timur semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini berdampak pada

¹¹ Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori..., hal. 430

jumlah karyawan. Disisi lain, jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja akan meningkatkan angka pengangguran di wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang.¹² Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.¹³

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk dapat hidup layak. Perkembangan besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021 terlihat pada tabel berikut:

¹² Saputra, W.A, *Tingkat Kemiskinan*, Ekonomi dan Bisnis, 2011

¹³ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 2020

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur
(persen) tahun 2017-2021

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11
Jawa Barat	70,69	71,30	72,03	72,09	72,45
Jawa Tengah	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16
DI Yogyakarta	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22
Jawa Timur	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, 2021

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5 Provinsi di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan selama tahun 2017-2021. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Timur yang nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia nya meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik.

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan serta mengikuti pola yang tidak mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tidak segera ditanggulangi dapat menimbulkan masalah lain seperti, kriminalitas, kemiskinan, bahkan sampai gangguan kesehatan.¹⁴ Selain itu, tingkat pengangguran juga menjadi salah satu tolak ukur perekonomian untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Sulawesi Selatan dalam angka 2007*, (Makasar: BPS, 2007)

yang belum menemukan titik terang hingga saat ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2017 - 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
5. Apakah tingkat upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan tingkat upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk menguji pengaruh signifikan tingkat upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap dunia akademisi, masyarakat umum, para stakeholder dan pribadi penulis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis sebagai sumber informasi tambahan dan membantu perkembangan keilmuan khususnya

dalam bidang studi kajian ilmu ekonomi mengenai pengaruh tingkat upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran.

2. Secara Praktis

a. Bagi pengambil kebijakan

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, sehingga dapat dijadikan sarana evaluasi dan memahami lebih jauh untuk mengambil kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan pengangguran ini.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literasi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya guna menambahkan pengetahuan khususnya bagi pihak yang tertarik dengan masalah yang sama.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka penulis memberikan pembatasan masalah pada tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran Provinsi Jawa Timur

periode tahun 2017-2021. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam sebuah penelitian digunakan supaya tidak terjadi perbedaan dalam pemahaman pada penelitian ini. Penegasan istilah yang berkaitan dengan judul ini adalah:

1. Definisi Konseptual

- a. Tingkat Upah Minimum adalah upah terendah yang diatur oleh pemerintah untuk dijadikan standar oleh pengusaha dalam menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya.¹⁵
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah penduduk wilayah lain.¹⁶
- c. Penduduk adalah sejumlah orang yang bertempat tinggal atau berdomisili pada suatu wilayah tertentu pada suatu negara dalam jangka waktu yang cukup lama.¹⁷

¹⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori...*, hal. 13

¹⁶ Ibid

¹⁷ Bailah, *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 77

- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang.¹⁸
- e. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan.¹⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara nyata dan riil dalam konteks yang diteliti. Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran terbuka yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pola penelitian ini maka diperlukan sistematika penulisan. Dari penelitian ini akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal, terdiri dari : halaman sampul depan; halaman judul; persembahan; kata pengantar; daftar isi; daftar gambar; daftar tabel; daftar lampiran; transliterasi; dan abstrak.

Bagian inti, terdiri dari:

¹⁸ Saputra, W.A, *Tingkat Kemiskinan*. Ekonomi dan Bisnis, 2011

¹⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 2020

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran singkat terkait objek atau subjek yang hendak diteliti. Selain itu, peneliti juga menjelaskan tentang alasan kenapa skripsi ini dibuat. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori atas variabel yang hendak diteliti. Selain itu, peneliti juga menggambarkan secara konseptual terkait hubungan antar variabel. Bab ini terdiri dari: kerangka teori yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: pengangguran terbuka, upah minimum, , Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, skala pengukuran penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis). Hasil penelitian diperoleh dari data sekunder yang kemudian diolah sedemikian rupa oleh penulis untuk selanjutnya diuraikan pada bab selanjutnya.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta menjelaskan kaitannya dengan latar belakang penelitian untuk dijadikan acuan dalam menarik kesimpulan. Bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data dengan mendiskusikan antara fakta, data, dengan buku dan penelitian yang relevan.

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari: kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka dan lampiran.